

DATA TAK BERSAMBUT: PERSEPSI KEPALA SEKOLAH DASAR ATAS SINERGI KEBIJAKAN RAPOR PENDIDIKAN

Diani Ayu Pratiwi¹, Sulistiyana², Ahmad Suriansyah³

¹PGSD, FKIP, Universitas Lambung Mangkurat

²Bimbingan Konseling, FKIP, Universitas Lambung Mangkurat

³Administrasi Pendidikan Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat

¹diani.pratiwi@ulm.ac.id

ABSTRACT

The transformation of Indonesia's national education system through the implementation of the Education Report Card represents a major shift towards data-driven evaluation practices. However, the extent to which elementary school principals are able to interpret, utilize, and respond to this policy has not been widely studied. This study aims to examine the perceptions of elementary school principals towards the policy synergy between the central government and local governments in the implementation of the Education Report Card. Using a descriptive quantitative approach, this study involved 85 elementary school principals in Banjarmasin City from a total of 260 questionnaires distributed. The instrument used was a structured Likert scale questionnaire that assessed five main dimensions: personal readiness, quality of school management, utilization of the education report card, condition of facilities and infrastructure, and perceptions of policy synergy. The results of the study indicate that although principals have high personal readiness and positive perceptions of the national evaluation policy, there are still challenges in its implementation, especially related to limited facilities, minimal support from local governments, and low institutional data literacy. This study concludes that policy implementation is not enough just through data dissemination, but must be accompanied by ongoing cross-government collaboration, contextual capacity building, and comprehensive systemic support. These findings provide a basis for improving policy design and encourage further longitudinal and mixed-method studies to evaluate the long-term impact of report card-based school improvement strategies.

Keywords: education report card, elementary school principal, data-based evaluation, policy synergy

ABSTRAK

Transformasi sistem pendidikan nasional Indonesia melalui implementasi Rapor Pendidikan merepresentasikan pergeseran besar menuju praktik evaluasi berbasis data. Namun, sejauh mana kepala sekolah dasar mampu menafsirkan, memanfaatkan, dan merespons kebijakan ini masih belum banyak dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi kepala sekolah dasar terhadap sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Rapor Pendidikan. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, penelitian ini melibatkan 85 kepala sekolah dasar di Kota Banjarmasin dari total 260 angket yang disebar. Instrumen yang digunakan berupa angket skala Likert terstruktur yang menilai lima dimensi utama: kesiapan personal, kualitas manajemen sekolah, pemanfaatan rapor pendidikan, kondisi sarana prasarana, dan

persepsi terhadap sinergi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kepala sekolah memiliki kesiapan personal yang tinggi dan persepsi positif terhadap kebijakan evaluasi nasional, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama terkait keterbatasan sarana, minimnya dukungan pemerintah daerah, dan rendahnya literasi data institusional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak cukup hanya melalui penyebaran data, tetapi harus disertai kolaborasi lintas pemerintahan yang berkelanjutan, penguatan kapasitas yang kontekstual, serta dukungan sistemik yang menyeluruh. Temuan ini memberikan dasar untuk penyempurnaan desain kebijakan dan mendorong studi lanjutan secara longitudinal maupun dengan metode campuran untuk mengevaluasi dampak jangka panjang strategi perbaikan sekolah berbasis rapor.

Kata kunci: rapor pendidikan, kepala sekolah dasar, evaluasi berbasis data, sinergi kebijakan

A. Pendahuluan

Transformasi sistem pendidikan nasional Indonesia memasuki fase baru dengan diterapkannya Rapor Pendidikan sebagai instrumen evaluasi yang terstandar dan berbasis data, sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022. Kebijakan ini dirancang untuk menghadirkan sistem evaluasi yang komprehensif, integratif, dan berkelanjutan, serta mendorong pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*) di tingkat satuan pendidikan. Kepala sekolah, sebagai pemimpin sentral dalam ekosistem manajemen sekolah dasar, diharapkan mampu menafsirkan, memanfaatkan, dan merespon data rapor pendidikan secara adaptif. Namun, muncul pertanyaan penting: sejauh mana

kepala sekolah benar-benar memahami serta merasakan kebermanfaatan kebijakan ini, khususnya dalam konteks sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Tantangan ini semakin nyata mengingat bahwa kepala sekolah seringkali menghadapi kompleksitas administratif dan tuntutan adaptasi terhadap reformasi kebijakan yang dinamis (Mansir, 2023), serta kurangnya pelatihan yang memadai terkait implementasi kebijakan berbasis data (Setyawanto et al., 2024).

Idealnya, sinergi kebijakan pusat dan daerah dalam implementasi evaluasi pendidikan berbasis Rapor Pendidikan berjalan harmonis dan saling melengkapi. Rapor pendidikan diharapkan menjadi jembatan informasi yang menyatukan arah kebijakan nasional dan kondisi

kontekstual lokal. Namun dalam praktiknya, banyak kepala sekolah dasar menghadapi tumpang tindih kebijakan, ketidakselarasan indikator pusat dengan kebutuhan daerah, serta minimnya pendampingan teknis dari pemerintah daerah (Irawan et al., 2024; Mahtonami et al., 2019). Temuan awal menunjukkan bahwa meskipun kepala sekolah menerima laporan rapor pendidikan, belum banyak yang dapat menerjemahkannya secara strategis ke dalam rencana kerja sekolah, terlebih dalam ekosistem yang minim dukungan anggaran, pelatihan, dan koordinasi lintas level pemerintahan (Mansir et al., 2022; Widodo & Wiyani, 2024).

Secara teoritik, pendekatan *Data-Driven Leadership dan Distributed Policy Implementation* menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan sangat tergantung pada kapasitas agen pelaksana di tingkat lokal serta keberfungsian sistem intermediasi kebijakan antar level pemerintahan. Dalam konteks pendidikan dasar, kepala sekolah berperan sebagai *policy sense-maker* yang harus menafsirkan dan menyesuaikan kebijakan pusat

dengan realitas sekolah. Akan tetapi, beberapa studi di Indonesia mengindikasikan lemahnya integrasi antara sistem evaluasi nasional dan kapasitas lokal dalam mengimplementasikan hasil evaluasi (Setyawanto et al., 2024; Sholeh & Trihantoyo, 2019). Selain itu, keterbatasan dalam infrastruktur dan literasi data menjadi hambatan besar dalam menjadikan rapor pendidikan sebagai alat navigasi manajerial yang efektif (Turnadi & Sharma, 2022; Widodo & Wiyani, 2024).

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah kajian yang belum banyak menyentuh aspek persepsi kepala sekolah dasar terhadap sinergi kebijakan pusat-daerah dalam implementasi evaluasi berbasis rapor pendidikan. Kebaruan dari studi ini terletak pada pendekatan mikro yang mengedepankan suara aktor lapangan sebagai sumber refleksi terhadap kebijakan makro. Dengan menjadikan persepsi kepala sekolah sebagai jendela untuk membaca efektivitas kebijakan, riset ini diharapkan mampu menghasilkan insight yang berguna dalam penyusunan program pelatihan, penguatan koordinasi pusat-daerah,

serta desain ulang mekanisme evaluasi agar lebih relevan dan kontekstual terhadap kebutuhan satuan pendidikan dasar (Mahtonami et al., 2019; Mansir, 2023).

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan persepsi kepala sekolah dasar terhadap pelaksanaan rapor pendidikan; (2) mengeksplorasi pandangan mereka terhadap kesesuaian dan efektivitas sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah; dan (3) mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural yang menghambat pemanfaatan optimal rapor pendidikan dalam pengambilan keputusan sekolah. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur kebijakan pendidikan berbasis evaluasi serta menjadi dasar rekomendasi perbaikan implementasi kebijakan yang lebih kolaboratif dan responsif terhadap kebutuhan akar rumput pendidikan dasar (Irawan et al., 2024; Setyawanto et al., 2024).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan persepsi kepala sekolah dasar

terhadap sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam implementasi evaluasi sistem pendidikan berbasis *Rapor Pendidikan*. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memetakan kecenderungan sikap, pemahaman, serta respons kepala sekolah secara sistematis terhadap kebijakan yang diatur dalam Permendikbudristek No. 9 Tahun 2022. Penelitian dilakukan pada rentang waktu Januari hingga Maret 2025 di wilayah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan unit analisis berupa kepala sekolah dari jenjang sekolah dasar baik negeri maupun swasta.

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dasar aktif di lima kecamatan di Kota Banjarmasin, yang tersebar secara proporsional di wilayah urban dan semi-urban. Jumlah instrumen angket yang disebarkan sebanyak 260 eksemplar, namun yang dikembalikan dalam keadaan lengkap dan layak analisis sebanyak 85 angket, atau setara 32,7% dari total populasi. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan memilih kepala sekolah yang

secara aktif menjalankan tugas kepemimpinan dan telah mengikuti sosialisasi atau pelatihan terkait rapor pendidikan. Instrumen utama berupa angket tertutup dengan skala Likert lima poin, terdiri dari 100 butir pernyataan yang mencerminkan lima aspek utama: (1) kesiapan personal kepala sekolah, (2) kualitas pengelolaan satuan pendidikan, (3) pemanfaatan rapor pendidikan, (4) kondisi sarana dan prasarana, dan (5) persepsi terhadap sinergi kebijakan pusat dan daerah dalam evaluasi pendidikan. Validitas isi angket ditelaah oleh tiga pakar manajemen pendidikan, sementara reliabilitas instrumen diuji menggunakan koefisien Cronbach's Alpha dengan hasil keseluruhan $>0,80$ yang menunjukkan konsistensi internal yang tinggi.

Data dianalisis secara kuantitatif menggunakan teknik statistik deskriptif. Proses analisis mencakup penghitungan rerata, persentase, dan standar deviasi untuk setiap indikator, serta tabulasi silang sederhana guna mengamati keterkaitan antar aspek yang diteliti. Penyajian hasil dilakukan dalam bentuk tabel dan grafik visual untuk memberikan gambaran yang

lebih komprehensif tentang kecenderungan persepsi kepala sekolah terhadap sinergi kebijakan. Selain itu, interpretasi hasil dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip evaluasi pendidikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Permendikbudristek No. 9 Tahun 2022, serta dikaitkan dengan hasil temuan penelitian sebelumnya. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menyajikan gambaran utuh dan sistematis tentang bagaimana kebijakan evaluasi nasional diterima, dimaknai, dan direspons oleh pelaku pendidikan di tingkat akar rumput secara nyata dan berbasis bukti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil analisis data dari 85 kepala sekolah dasar menunjukkan bahwa secara umum mereka memiliki tingkat kesiapan personal yang cukup baik dalam memahami prinsip evaluasi berbasis Rapor Pendidikan. Rata-rata skor pada aspek ini berada pada kategori "Setuju" dengan rerata 4,12 dari skala lima poin. Kepala sekolah menyatakan telah familiar dengan indikator evaluasi, memiliki rencana aksi berdasarkan hasil rapor, serta memahami prosedur sebagaimana tercantum dalam

Permendikbudristek No. 9 Tahun 2022.

Pada aspek pengelolaan satuan pendidikan, ditemukan bahwa kepala sekolah cukup mampu melibatkan warga sekolah dalam refleksi mutu, menyusun perencanaan berdasarkan data, serta memanfaatkan teknologi informasi secara terbatas. Skor rerata aspek ini adalah 3,89, yang mengindikasikan bahwa praktik manajemen berbasis data mulai terbangun namun belum konsisten. Sebagian besar responden (68%) menyatakan belum memiliki sistem dokumentasi evaluasi yang terstandarisasi.

Terkait pemanfaatan rapor pendidikan, respon kepala sekolah cenderung fluktuatif. Rerata skor 3,74 mengindikasikan bahwa meskipun rapor telah dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan program kerja, penggunaannya belum menjadi alat refleksi strategis secara menyeluruh. Sebagai contoh, pernyataan "Saya menjadikan hasil rapor pendidikan sebagai acuan utama supervisi guru" hanya disetujui oleh 57% responden. Ini menunjukkan adanya ketimpangan

dalam integrasi data ke dalam siklus pengambilan keputusan.

Aspek sarana dan prasarana mendapat skor rerata terendah (3,51) yang berarti "Kurang Siap". Banyak kepala sekolah menyampaikan kendala dalam mengakses laboratorium, fasilitas literasi, sanitasi, dan dukungan pembelajaran inklusif. Sebagaimana dinyatakan oleh salah satu kepala sekolah: *"Rapor pendidikan menuntut kami mengembangkan kualitas, tetapi fasilitas yang kami miliki tidak mendukung langkah perbaikan yang ditargetkan."*

Salah satu fokus utama penelitian adalah persepsi terhadap sinergi kebijakan antara pusat dan daerah. Rerata skor aspek ini cukup tinggi yaitu 4,03, namun dengan deviasi standar tinggi, menunjukkan variasi persepsi. Beberapa responden merasa bahwa kebijakan pusat belum mengakomodasi karakteristik lokal. Sebagai ilustrasi, 62% kepala sekolah setuju bahwa "Evaluasi sistem pendidikan dari pusat seringkali tidak mencerminkan tantangan spesifik sekolah di daerah."

Temuan penting lainnya adalah adanya kesenjangan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hanya 41% kepala sekolah yang menyatakan pernah mendapat pelatihan dari pemerintah daerah terkait penggunaan rapor pendidikan. Selebihnya, mereka memperoleh pemahaman secara otodidak atau melalui komunitas profesi kepala sekolah. Hal ini menimbulkan ketidaksinambungan dalam implementasi dan melemahkan semangat integratif dari kebijakan nasional.

Hanya sebagian kepala sekolah (sekitar 53%) yang secara konsisten menyusun rencana tindak lanjut berbasis hasil evaluasi. Pernyataan "Saya terbiasa menyusun langkah perbaikan dari hasil evaluasi internal maupun eksternal" memiliki skor rerata 3,67. Kondisi ini menunjukkan bahwa siklus refleksi belum sepenuhnya mengakar sebagai budaya mutu dalam manajemen sekolah dasar.

Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, beberapa kepala sekolah menunjukkan inisiatif strategis, seperti menyusun *panduan*

internal, membentuk *tim pengembang sekolah*, atau mengintegrasikan rapor dalam rapat kerja tahunan. Praktik-praktik ini menjadi contoh adaptasi lokal yang positif dan dapat dijadikan *best practice* untuk wilayah lain. Seorang kepala sekolah bahkan menyatakan: "*Kami tidak bisa menunggu intervensi, sekolah harus bergerak dulu dengan sumber daya yang ada.*"

Literasi data menjadi salah satu tantangan utama. Beberapa kepala sekolah menyatakan belum memahami sepenuhnya indikator dalam rapor pendidikan, terutama dalam menafsirkan dan menerjemahkannya ke dalam strategi konkret. Pernyataan seperti "Saya masih bingung menafsirkan indikator rapor" dan "Saya belum mampu memanfaatkan data sebagai alat refleksi kebijakan sekolah" banyak disetujui oleh responden, dengan skor rerata berada di bawah 3,5.

Temuan ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa meskipun kepala sekolah memiliki komitmen yang kuat terhadap evaluasi mutu, sistem pendukung dari sisi kebijakan, pelatihan, dan sarana belum sepenuhnya sejalan. Rapor

pendidikan yang semestinya menjadi alat transformasi berbasis data, dalam praktiknya seringkali menjadi “data tak bersambut” karena belum terhubung dengan tindakan sistemik dan dukungan lintas level pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pelibatan yang lebih partisipatif, pendampingan teknis yang berkelanjutan, serta integrasi platform evaluasi dengan realitas kebutuhan sekolah dasar.

Berikut data hasil instrument angket yang dibagikan kepada kepala sekolah kota Banjarmasin:

Table 1. Persepsi Kepala Sekolah per Aspek Evaluasi

No	Aspek Temuan	Rerata Skor (1-5)	Interpretasi
1	Kesiapan Personal Kepala Sekolah	4,12	Siap
2	Kualitas Pengelolaan Satuan Pendidikan	3,89	Cukup Siap
3	Pemanfaatan Rapor Pendidikan	3,74	Cukup Siap
4	Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan	3,51	Kurang Siap
5	Persepsi terhadap	4,03	Positif

Sinergi
Kebijakan



Gambar 1 persepsi kepala sekolah dasar terhadap kebijakan

Temuan penelitian ini membuka wawasan penting mengenai dinamika implementasi kebijakan evaluasi sistem pendidikan di tingkat akar rumput. Kesiapan kepala sekolah yang tinggi dalam aspek personal menunjukkan bahwa kapasitas individu pemimpin sekolah telah berkembang menuju arah manajerial yang berbasis data (Setyawanto et al., 2024; Widodo & Wiyani, 2024). Namun, hal ini tidak serta-merta menjamin keberhasilan sistemik ketika instrumen kebijakan tidak sepenuhnya terhubung dengan konteks pelaksanaan di lapangan (Mansir, 2023).

Tingginya pemahaman kepala sekolah terhadap prinsip evaluasi dan indikator rapor pendidikan

menegaskan bahwa mereka telah memahami arah kebijakan transformasi pendidikan (Karo et al., 2024). Akan tetapi, ketiadaan ekosistem pendukung yang memadai baik dari sisi kebijakan teknis maupun fasilitas menyebabkan kesiapan tersebut tidak dapat diaktualisasikan secara optimal (Arifin et al., 2024). Ini menimbulkan ironi: kepala sekolah siap berlari, tetapi lintasannya belum dibangun.

Aspek pengelolaan satuan pendidikan yang hanya tergolong “cukup siap” menunjukkan bahwa kapasitas kolektif organisasi sekolah belum sejalan dengan kesiapan individu kepala sekolah (Supriyadi, 2018). Pernyataan tersebut menemukan korelasinya dengan hasil penelitian Suriansyah & Aslamiah, (2018) yang menunjukkan bahwa kepuasan kerja guru di sekolah berprestasi rendah berada pada tingkat lebih rendah, bukan semata karena rendahnya komitmen personal, melainkan karena lemahnya lingkungan institusional yang mendukung proses belajar mengajar. Artinya, kualitas organisasi—bukan hanya kapasitas personal kepala sekolah—merupakan determinan

utama dalam membentuk iklim kerja yang positif dan produktif. Tantangan terbesar bukan pada komitmen, tetapi pada pengorganisasian strategi perbaikan berbasis data yang terintegrasi, berkelanjutan, dan terdokumentasi dengan baik (Mazhabi, 2025). Banyak sekolah belum memiliki sistem manajemen mutu internal yang sistematis, terutama dalam konteks refleksi dan pelaporan siklus perbaikan (Trihantoyo et al., 2023).

Pemanfaatan rapor pendidikan sebagai instrumen pengambilan keputusan belum mengakar sebagai budaya institusional. Meskipun kepala sekolah memahami urgensinya, belum banyak yang menjadikan data sebagai pusat gravitasi dalam perencanaan, pembinaan guru, dan evaluasi pembelajaran (Riski et al., 2023). Hal ini mencerminkan bahwa data masih dipandang sebagai pelengkap administratif, bukan sebagai landasan strategis perubahan.

Temuan bahwa sarana dan prasarana menjadi aspek terlemah tidak sekadar soal fasilitas fisik, tetapi juga tentang lemahnya dukungan sistemik terhadap pencapaian standar mutu

nasional (Mansir, 2023). Ketika indikator rapor pendidikan menuntut pembelajaran berbasis literasi, numerasi, dan inklusivitas, maka absennya fasilitas pendukung akan membuat rapor tersebut tidak lebih dari potret ideal yang jauh dari realitas operasional.

Persepsi positif terhadap kebijakan pusat bukanlah jaminan bahwa pelaksanaannya di daerah berlangsung harmonis. Ketidaksiharian antara kebijakan pusat dan kemampuan teknis daerah untuk mengimplementasikannya menciptakan ruang kebingungan dan inisiatif sporadis di tingkat sekolah (Setyawanto et al., 2024). Kepala sekolah menjadi aktor yang bekerja di tengah ketidakpastian struktur, mengimprovisasi arah kerja tanpa pedoman koordinatif yang memadai. Hal ini selaras dengan temuan Susilawati et al. (2021) yang menunjukkan bahwa peran kepala sekolah sebagai pemimpin transformasional sangat penting untuk membangun budaya kerja kolektif yang mampu mengarahkan guru secara strategis dalam kondisi yang tidak pasti.

Ketiadaan sinergi kebijakan dan lemahnya pendampingan teknis dari pemerintah daerah melemahkan semangat keberlanjutan dalam pemanfaatan data evaluasi (Arifin et al., 2024). Dalam banyak kasus, evaluasi berakhir sebagai pelaporan formal tanpa mekanisme pembelajaran dan tindak lanjut. Jika siklus ini terus berlanjut, maka visi evaluasi berkelanjutan sebagaimana dicanangkan dalam Permendikbudristek No. 9 Tahun 2022 hanya akan menjadi slogan kebijakan tanpa realitas praktik. Sejalan dengan itu, studi Sulistiyana et al (2019) menekankan pentingnya penerapan manajemen mutu terpadu (TQM) melalui prinsip PDCA (*Plan-Do-Check-Action*) dalam layanan pendidikan agar evaluasi tidak berhenti pada laporan administratif, melainkan mendorong perbaikan berkelanjutan berbasis umpan balik.

Masih banyak kepala sekolah yang menunjukkan keraguan dalam menafsirkan indikator rapor pendidikan secara strategis. Hal ini bukan semata soal kemampuan teknis membaca data, tetapi juga menyangkut kapasitas berpikir sistemik untuk merumuskan intervensi

berbasis bukti (Ali, 2023). Literasi data yang rendah berisiko melahirkan interpretasi yang keliru terhadap kekuatan dan kelemahan sekolah, yang pada gilirannya akan menciptakan program yang tidak relevan (Widodo & Wiyani, 2024). Sejalan dengan itu Imron et al. (2020) mengemukakan bahwa penguatan kompetensi profesional kepala sekolah dan guru mutlak diperlukan agar mereka mampu mentransformasikan data evaluatif menjadi strategi pengembangan kelembagaan yang adaptif dan kontekstual.

Meskipun demikian, sejumlah kepala sekolah menunjukkan praktik inovatif yang bersumber dari inisiatif lokal, seperti membentuk tim pengembang mutu, merancang panduan internal berbasis indikator rapor, dan mengintegrasikan hasil evaluasi dalam forum guru (Wilian et al., 2020). Praktik ini membuktikan bahwa pelibatan kepala sekolah secara aktif dalam desain kebijakan akan lebih efektif daripada sekadar menjadikan mereka sebagai objek penerima kebijakan. Potensi ini perlu diperluas melalui pemberdayaan yang sistematis. Dukungan literatur dari

Susilawati et al. (2021) mempertegas bahwa kepemimpinan transformasional yang disertai komunikasi interpersonal efektif mampu mendorong disiplin kerja dan performa guru, yang menjadi fondasi penting bagi pembaruan berbasis komunitas sekolah.

Secara konseptual, rapor pendidikan seharusnya menjadi alat transformasi manajerial dan pedagogis di sekolah. Namun, ketika data tidak disambut dengan kebijakan yang responsif dan sistem pendukung yang sinergis, maka evaluasi hanya menjadi ritual tahunan (Trihantoyo et al., 2023) . Pemerintah pusat dan daerah harus bergerak dari pendekatan “command-and-control” menuju model kolaboratif, yang tidak hanya mengukur, tetapi juga memberdayakan. Tanpa itu, transformasi pendidikan yang berbasis data akan berhenti di atas kertas—data tak bersambut.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun kepala sekolah dasar di Kota Banjarmasin menunjukkan kesiapan personal yang tinggi dalam memahami dan mengaplikasikan prinsip evaluasi

berbasis *Rapor Pendidikan*, keberhasilan implementasinya masih terhambat oleh rendahnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, keterbatasan sarana-prasarana, serta lemahnya literasi data institusional. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap kajian implementasi kebijakan berbasis data dengan menyoroti pentingnya konektivitas vertikal antar level pemerintahan dan kapasitas manajerial di tingkat satuan pendidikan. Secara praktis, hasil studi ini menegaskan perlunya redesain strategi pendampingan kebijakan yang lebih kontekstual, kolaboratif, dan berkelanjutan, khususnya dalam mengembangkan sistem evaluasi yang tidak hanya mengukur, tetapi juga memungkinkan. Untuk memperluas pemahaman, penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan longitudinal dan metode campuran (mixed methods) guna mengevaluasi efektivitas tindakan perbaikan pasca rapor, serta mengkaji dinamika peran pemerintah daerah dalam mentranslasikan kebijakan nasional ke dalam program yang relevan di tingkat sekolah dasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Q. (2023). A Comparative Study of Leadership Attributes of Pakistani and Indonesian Principals in Public Schools. *Sukkur IBA Journal of Educational Sciences and Technologies*. <https://doi.org/10.30537/sjest.v3i2.1270>
- Arifin, F., Marini, A., & MS, Z. (2024). Enhancing Educational Governance: A Literature Review on Policy Management in Elementary Schools in Indonesia. *Madrasah: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 16(2), 107–120. <https://doi.org/10.18860/mad.v16i2.21197>
- Imron, A., Ariesta Dewi, V., Sonhadji, A., Suriansyah, A., & Aslamiah. (2020). *Lecturer Development Competency Management in Improving the Quality of Education and Teaching*. 381(CoEMA), 94–99. <https://doi.org/10.2991/coema-19.2019.21>
- Irawan, M., Bella, S., & Latifah, A. (2024). Teachers and Parents Perceptions of the 9-Year Compulsory Education Policy in Indonesia. *Journal of Insan Mulia Education*. <https://doi.org/10.59923/joinme.v2i2.207>
- Karo, N. H. B., Siregar, E. B., Giawa, F., Rahman, A., & Setiawan, D. (2024). Implementation of the Principal's Democratic Leadership Style in the Independent Learning Curriculum. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(2), 1683–1690. <https://doi.org/10.58230/27454312.711>
- Mahtonami, B., Darwin, D., & Rahman, A. (2019). *Implementation of Ministerial Regulation of Education and Cultural, Number 28 of 2016 concerning Quality Assurance of Primary and Secondary*

- Education in Medan City*. 28. <https://doi.org/10.4108/eai.3-11-2018.2285599>
- Mansir, F. (2023). Principal's Leadership in Responding to The Reform of Indonesian Education: Studi in Elementary School 1 South Tangerang. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(3), 528–537. <https://doi.org/10.37329/cetta.v6i3.2514>
- Mansir, F., Purnomo, H., & Sa'adi, M. (2022). *THE ROLE OF THE PRINCIPAL FOR EDUCATIONAL REFORM IN INDONESIA*. 16(1), 13–21.
- Mazhabi, Z. (2025). Investigating leadership attributes and strategies during times of crisis and educational change: A story of public primary school principals in Lombok, Indonesia. *Educational Management Administration & Leadership*. <https://doi.org/10.1177/17411432241300280>
- Riski, A., Nurdin, D., Hartini, N., & Prajuri, M. D. H. (2023). Implementation of Digital Leadership of School Principals in Indonesia: Systematic Literature Review. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 15(2), 237. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v15i2.51553>
- Setyawanto, A., Hariyadi, B., & Hariyadi, A. (2024). Leadership Transformation Policy: Perspectives of Private Schools in Indonesia. *EDUTECH: Journal of Education And Technology*. <https://doi.org/10.29062/edu.v8i2.1087>
- Sholeh, M., & Trihantoyo, S. (2019). *Evaluating Teachers' Assignment Implementation as School Principals Preparation Program in Indonesia*. 387(Icei), 151–154. <https://doi.org/10.2991/icei-19.2019.36>
- Sulistiyana, Wiyono, B. B., Imron, A., & Suriansyah, A. (2019). Total quality management program specific guidance and counselling services in the state high school. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 5(4), 564–582.
- Supriyadi, D. (2018). Principal Procurement Policy Analysis in Achieving School Management Excellence. *International Journal of Management Excellence*. <https://doi.org/10.17722/IJME.V11I3.501>
- Suriansyah, A., & Aslamiah. (2018). Teacher's Job Satisfaction On Elementary School: Relation To Learning Environment. *The Open Psychology Journal*, 11(1), 123–130. <https://doi.org/10.2174/1874350101811010123>
- Susilawati, Y., Suhaimi, & Noorhapizah. (2021). Relationship of Transformational Leadership, Interpersonal Communication with Teacher Performance through Teacher Discipline. *J Adv Educ Philos*, 5(11), 357–363. <https://doi.org/10.36348/jaep.2021.v05i11.004>
- Trihantoyo, S., Herachwati, N., Purwono, R., Suhariadi, F., & Aldhi, I. F. (2023). Empowering Leadership in Emancipated School Program: A Systematic Literature Review. *RSF Conference Series: Business, Management and Social Sciences*, 3(3), 141–149. <https://doi.org/10.31098/bmss.v3i3.658>
- Turnadi, T., & Sharma, M. R. (2022). Main Tasks and Functions of Schools in Indonesia. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Widodo, H., & Wiyani, N. A. (2024). *Indonesian School Principals' Strategic Leadership in Implementing 21st-Century Learning*. 6(6), 1–11.
- Wilian, S., Waluyo, U., Muntari, M., & Karta, I. W. (2020). *Servant Leadership Model as Catalyst in Strengthening Character Education: An Exploration Study of Principal's Leadership in Sumbawa Regency Indonesia*. 465(Access 2019), 66–69.
-

[https://doi.org/10.2991/assehr.k.
200827.018](https://doi.org/10.2991/assehr.k.200827.018)